

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kawasan industri di Indonesia merupakan salah satu bentuk pembangunan strategis yang saat ini tengah digencarkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kawasan industri dipandang mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan produktivitas sektor manufaktur. Namun, pembangunan ini idealnya dilakukan secara terencana, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan—baik secara ekologis, ekonomi, maupun sosial. Sharpley (dalam Faoziah, 2023:5) menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan harus mengelola sumber daya alam dan manusia secara bijak, menjaga kelestarian lingkungan dalam jangka panjang, serta melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan. Oleh karena itu, pengembangan kawasan industri sepatutnya tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis, serta memastikan keterlibatan aktif masyarakat sekitar sebagai bagian dari pembangunan inklusif.

Lokasi kawasan industri ditentukan berdasarkan rencana tata ruang yang dikeluarkan oleh daerah tingkat dua atau kabupaten (Ismail, 2016). Menurut Keputusan Presiden (Keppres) nomor 33 tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24

tahun 2009 tentang Kawasan Industri, kawasan industri merupakan hamparan lahan yang digunakan untuk kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2009 tersebut, kawasan industri merupakan tempat pemusatan segala kegiatan industri yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan terkait yang memiliki izin usaha atas kawasan industri tersebut.

Pembangunan kawasan industri krusial untuk dilakukan, mengingat semakin tingginya laju pertumbuhan penduduk diiringi dengan semakin meningkatnya pula kebutuhan hidup manusia dan kebutuhan akan mencukupi perekonomiannya. Adanya kawasan industri menjadi solusi akan jumlah angkatan kerja yang semakin banyak dan semakin meningkat. Menurut Nur dalam Salamah (2023), adanya pembangunan kawasan industri akan mampu menyerap banyak tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mengakibatkan maraknya pembangunan industri dan terbuka bagi bidang-bidang usaha lainnya, seperti kegiatan-kegiatan dalam sektor jasa.

Pembangunan menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan akan ketersediaan lahan. Namun kenyataannya peningkatan kebutuhan akan lahan tidak diikuti dengan ketersediaan lahan yang luas. Lahan bersifat tetap dan tidak dapat bertambah, kenyataan yang terjadi justru adalah penyusutan lahan (Wardani, dll, 2014). Jumlah lahan kosong dapat dikatakan sedikit dan sulit untuk mendapatkan lahan kosong yang luas untuk dilakukan pembangunan kawasan industri, sehingga

yang memungkinkan terjadi adalah alih fungsi lahan. Hal ini berdampak semakin banyaknya penggunaan lahan yang mulai beralih fungsi seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan.

Menurut Kustiawan (1997) dalam Mahardika dan Mutaali (2018), setidaknya terdapat tiga faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan, yaitu: (1) Faktor eksternal, faktor yang timbul akibat adanya dinamika pertumbuhan wilayah (fisik maupun spasial), demografi juga ekonomi; (2) Faktor internal, faktor yang lebih meninjau sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi rumah tangga pengguna lahan; (3) Faktor kebijakan, yaitu faktor yang merupakan aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan untuk pembangunan. Apabila lahan yang kemudian digunakan untuk pembangunan adalah lahan milik masyarakat, maka hal ini akan sangat berdampak bagi masyarakat dan tidak jarang justru merugikan masyarakat (Desy, 2018).

Kabupaten Bekasi merupakan merupakan salah satu kawasan industri yang berada di Jawa Barat, notabenennya tidak jauh dari pusat yaitu DKI Jakarta. Tercatat Kabupaten Bekasi menjadi salah satu kawasan industri di Asia Tenggara yang pusatnya ada di Kecamatan Cikarang. Kabupaten Bekasi dijadikan kawasan industri sebab DKI Jakarta sudah tidak memungkinkan karena lahan yang tersedia sudah sangat terbatas untuk dilakukan pembangunan industri (Ariefana, 2021). Salah satu kawasan industri di Kabupaten Bekasi yaitu Megalopolis Manunggal 2100 (MM 2100). Kabupaten Bekasi ini pada dasarnya merupakan wilayah

pertanian yang subur serta menjadi tulang punggung dalam produksi padi. Kabupaten Bekasi juga merupakan salah satu kabupaten yang mengalami alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian salah satunya untuk industri.

Terbentuknya kawasan industri utamanya di Kabupaten Bekasi ini memiliki dampak yang cukup berpengaruh untuk lahan pertanian. Peralihan fungsi lahan ini dapat berimbas bagi masyarakat di Kabupaten Bekasi khususnya bagi masyarakat sekitar MM 2100 di Kecamatan Cikarang. Secara umum terdapat dua permasalahan utama kawasan industri terhadap masyarakat pertanian, yaitu alih fungsi lahan dan perpindahan ekonomi masyarakat.

Gambar 1.1.
Data Luas Lahan Sawah



Sumber: BPS Kabupaten Bekasi, 2017

Berdasarkan permasalahan pertama, yaitu alih fungsi lahan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pada tahun 2014, Kabupaten Bekasi memiliki luas lahan sawah sebesar 51.961 hektare. Namun, luas lahan tersebut terus menyusut setiap tahunnya, yaitu menjadi 51.797 hektare pada tahun 2015, 50.857 hektare pada tahun 2016, dan 48.608 hektare pada tahun 2017. Bahkan, pada tahun 2018, luas lahan sawah di Kabupaten Bekasi terus berkurang hingga mencapai 42.771 hektare. Data ini mengindikasikan bahwa telah terjadi penyusutan lahan pertanian di Kabupaten Bekasi setiap tahunnya.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa alih fungsi lahan dan perpindahan ekonomi masyarakat ini akan berdampak negatif terhadap ekosistem pertanian, yakni berkurangnya lahan untuk produksi padi dan berkurangnya tenaga kerja petani yang dapat mengancam ketahanan pangan (Pratama, 2022). Sementara meningkatkan kesejahteraan petani merupakan hal yang penting, yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengendalikan pertanian agar seimbang. Studi Budiandrian, dll (2022) juga menemukan pembangunan yang melibatkan alih fungsi lahan berdampak buruk bagi masyarakat petani, termasuk berdampak bagi lingkungan dan sosial atau masyarakat di sekitar. Problematika yang marak mewarnai pembangunan yaitu menurunnya kualitas lingkungan, sosial, dan budaya di mana hal tersebut justru menciptakan kesenjangan antara pemilik modal dengan masyarakat setempat, serta potensi sosial dan ekonomi masyarakat yang turut termarginalkan.

Secara umum semua penelitian terdahulu menunjukkan temuan dampak negatif bagi Masyarakat yang terdampak (Prayoga et al., 2019; Irma, 2015; Iskandar D.Y., 2014; Azis, 2018; Muta'ali, 2018; Tokuasa, 2010), namun terdapat pula studi Mulyadi (2015) yang menunjukkan dampak positif dari alih fungsi lahan dari pertanian menjadi industri pada kesejahteraan masyarakat. Tetapi, dampak positif tersebut tidak utuh karena memiliki risiko kemunduran yang memengaruhi kehidupan sosial mereka. Penelitian ini juga berfokus pada dampak negatif dari alih fungsi lahan di Megalopolis Manunggal 2100 (MM 2100) Kabupaten Bekasi, dengan menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam merespon dampak negatif tersebut.

Di Kabupaten Bekasi sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian. Sebagian besar masyarakat hidup dari sektor pertanian. Perkembangan Kawasan Industri yang terjadi di Kabupaten Bekasi Kecamatan Cikarang merupakan salah satu representasi terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Alih fungsi lahan tersebut dapat memberikan dampak sosial hingga ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Memang dalam beberapa hal terbangunnya kawasan industri ini membawa dampak positif terhadap kemajuan ekonomi secara makro bagi negara, daerah dan segelintir pihak. Namun di lain sisi keuntungan ekonomi yang didapatkan tidak kemudian mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat di sekitar kawasan industri. Artinya, secara mikro kegiatan pembangunan industri masih menyimpan berbagai persoalan pada ekosistem dan tatanan sosial budaya masyarakat setempat. Tidak dapat dipungkiri bagi

masyarakat di Kabupaten Bekasi yang banyak pula berprofesi sebagai petani, lahan memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan dan sumber penghidupannya. Luas lahan sangat berpengaruh bagi banyak tidaknya pendapatan dan hasil yang didapatkan.

Terjadinya alih fungsi lahan ini mampu membawa dampak dan permasalahan yang pelik. Alih fungsi lahan pertanian yang tidak dibatasi dan tidak mampu menciptakan pembangunan yang berjangka panjang dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan peralihan profesi, dimana bahkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi terutama bagi masyarakat terdampak (Iqbal dan Sumaryanto, 2007: 167 - 182). Nasoetion dalam Irsalina, 2010 menyatakan pula bahwa dampak alih fungsi lahan sawah ke lahan non-pertanian terkait dengan aspek ekonomi masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung akan berdampak terhadap pergeseran kondisi ekonomi, tata ruang pertanian, prioritas-prioritas pembangunan pertanian wilayah dan nasional dan perubahan struktur sosial masyarakat. Pemilik lahan mengalih fungsikan lahan pertaniannya untuk kepentingan non-pertanian oleh karena mengharapkan keuntungan lebih. Secara ekonomis, lahan pertanian, terutama sawah, harga jualnya tinggi karena biasanya berada di lokasi yang berkembang. Namun, bagi petani penggarap dan buruh tani, alih fungsi lahan menjadi bencana karena mereka tidak bisa beralih pekerjaan. Para petani semakin terjebak dengan semakin sempitnya kesempatan kerja sehingga akan menimbulkan masalah sosial dan pergeseran profesi masyarakat.

Meskipun transformasi lahan sering kali dipandang menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, dan ekologis, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pula sejumlah dampak positif yang dirasakan sebagian masyarakat. Kehadiran kawasan industri MM2100 membuka peluang kerja baru, memperluas sektor jasa dan perdagangan, serta mendorong pertumbuhan infrastruktur di Kabupaten Bekasi. Akan tetapi, dampak positif ini tidak merata. Hanya kelompok masyarakat tertentu—mereka yang memiliki privilese berupa modal, pendidikan, atau akses jaringan—yang mampu meraih manfaat, sedangkan sebagian besar petani dan buruh tani justru semakin termarginalkan. Kondisi ini menimbulkan disparitas baru yang ironisnya justru diperkuat oleh keterlibatan pemerintah dalam proses kebijakan dan pengawasan.

Pada sisi lain, kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan inisiasi pemerintah lewat peranannya. Peran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat sangat sentral, dimana peran tersebut dapat dimulai dari lingkup pemerintahan yang paling rendah dan dekat dengan masyarakat (Euis, 2012). Alih fungsi lahan yang terjadi tanpa kendali dapat berpotensi menimbulkan persoalan ketahanan pangan, lingkungan dan ketenagakerjaan (Syahyuti, dalam Leonataris, 2012). Supaya lahan pertanian tidak terus menerus dialihfungsikan tanpa ada imbas baik bagi masyarakat, maka peran dari pemerintah, terutama pemerintah daerah menjadi aspek penting untuk menata kembali paradigma pembangunan dengan tetap memperhatikan struktur sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Dengan demikian peranan dari Pemerintah Daerah sangat berarti untuk kesejahteraan masyarakat

utamanya petani, agar dapat hidup sejahtera dan tetap dapat mempertahankan lahan pertanian mereka di tengah maraknya kawasan industri. Kehadiran pemerintah ini perlu untuk dikaji lebih dalam agar tidak sembarang tanah dapat dialihfungsikan menjadi lahan non pertanian melainkan juga menimbang dan memikirkan kembali dampak yang mungkin timbul mulai dari kondisi sosial hingga ekonomi masyarakat di Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa saja dampak negatif transformasi lahan pertanian menjadi lahan industri pada masyarakat yang terdampak di MM 2100 Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak negatif transformasi lahan pertanian menjadi lahan industri pada masyarakat di MM 2100 Kabupaten Bekasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan penulisan penelitian, yaitu:

1. Mengidentifikasi dampak negatif transformasi lahan pertanian menjadi lahan industri pada masyarakat yang terdampak di MM 2100 Kabupaten Bekasi.
2. Mengevaluasi upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak negatif transformasi lahan pertanian menjadi lahan industri pada masyarakat di MM 2100 Kabupaten Bekasi

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai landasan penelitian selanjutnya serta memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan transformasi lahan pertanian menjadi lahan industri dan dampaknya terhadap masyarakat setempat. Dalam hal ini juga memperkaya perspektif mengenai peran pemerintah dalam menghadapi perubahan yang terjadi juga menjadi peluang untuk menyelesaikan permasalahan serta menunjang pembentukan pembangunan atau pengelolaan transformasi yang lebih optimal di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

1. Pertama, penelitian ini dapat menambah kajian mengenai dampak negatif adanya alih fungsi lahan serta peran pemerintah dalam menanggapi terjadi perubahan tersebut.
2. Kedua, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam mengevaluasi kebijakan transformasi dan alih fungsi lahan dari pertanian ke lahan industri agar dapat berjalan dengan lebih optimal sesuai dengan tujuan awal dibentuknya program tersebut serta kedepannya dapat memperoleh evaluasi terkait dampak negatif dari transformasi lahan tersebut terhadap masyarakat.

1.5. Penelitian Terdahulu

Tidak banyak studi yang menemukan dampak positif dari alih fungsi lahan. Berdasar penelusuran literatur, terdapat dua penelitian terdahulu yang punya temuan positif dalam kehidupan ekonomi atas alih fungsi lahan pada masyarakat yang terdampak, tetapi masih ditemukan berbagai risiko pada aspek lain. Artikel karya Mulyadi (2015) yang berjudul “Perubahan Sosial Masyarakat Agraris ke Masyarakat Industri dalam Pembangunan Masyarakat di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ”, bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi peralihan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, temuannya menunjukkan bahwa perubahan ini dapat membawa kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan sosial, meskipun ada risiko kemunduran yang merugikan kehidupan sosial masyarakat. Berikutnya, Utomo, A.W. (2018) dalam studinya yang berjudul “Transisi Agraris ke Industri” di Dusun Timang, Kabupaten Wonogiri mendeskripsikan tentang peralihan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Penelitian tersebut menemukan bahwa perkembangan industri manufaktur berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini juga meningkatkan solidaritas mekanik dan organik di masyarakat.

Studi yang lain secara umum menemukan dampak negatif dari alih fungsi lahan pada Masyarakat terdampak. Studi Prayoga et al. (2019) dalam penelitian berjudul “Menakar Perubahan Sosio-Kultural Masyarakat Tani Akibat

Miskonsepsi Modernisasi Pembangunan Pertanian” menganalisis dampak negatif modernisasi yang tidak tepat dalam sektor pertanian. Mereka menyoroti miskonsepsi dalam penerapan modernisasi yang mengabaikan konteks lokal dan nilai budaya, serta terlalu fokus pada teknologi tanpa mempertimbangkan kearifan lokal. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan hati-hati dalam modernisasi pertanian, mengingat kompleksitas sosial dan budaya masyarakat tani.

Irma (2015) mengkaji “Perubahan Sosial Akibat Pertumbuhan Kawasan Industri di Desa Sukasirna dan Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur”, menemukan bahwa perkembangan industri mengubah pola kehidupan sosial masyarakat tani, dengan banyak petani beralih dari pertanian ke pekerjaan industri untuk mencari peluang yang lebih baik. Alhasil, jumlah tenaga kerja di sektor pertanian kian menurun seiring dengan dampak ekonomi yang menyelimuti petani akibat hasil pertanian yang tidak stabil dan tekanan dari pemilik industri.

Iskandar D.Y. (2014) dalam penelitiannya berjudul “Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Perubahan Orientasi Mata Pencarian di Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi” menemukan bahwa alih fungsi lahan pertanian berdampak signifikan pada perubahan mata pencarian petani. Banyak petani yang bergantung pada lahan yang dikelola pemilik tanah. Ketika lahan tersebut dijual, mereka kehilangan pekerjaan dan beralih ke sektor informal, seperti jasa, perdagangan, dan buruh industri.

Fenomena serupa juga terjadi di Jawa Barat. Aziz (2018) dalam penelitiannya “Dampak Konversi Lahan terhadap Struktur Sosial di Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung” menunjukkan bahwa konversi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan dan industri mengakibatkan pergeseran struktur sosial. Banyak petani kehilangan lahan, yang tidak hanya mengurangi pendapatan mereka, tetapi juga mengubah identitas dan peran sosial. Perubahan ini menimbulkan ketegangan antara penduduk yang tetap berpegang pada tradisi pertanian dan mereka yang beralih ke gaya hidup urban. Penelitian ini juga mencatat dampak negatif terhadap akses sumber daya penting, seperti air dan infrastruktur.

Mahardika dan Muta’ali (2018) dalam studi “Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Terbangun Untuk Industri Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sebagian Wilayah Kecamatan Ceper”, juga menggarisbawahi dampak signifikan dari alih fungsi lahan menjadi kawasan industri. Penelitian tersebut menemukan terjadi perubahan dinamika pendapatan masyarakat setelah terjadi alih fungsi lahan. Selain itu, perubahan kondisi sosial di Kecamatan Cepet terasa di dalam aspek keamanan, dimana tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas bertambah besar setelah terjadi alih fungsi lahan.

Interaksi sosial dalam perubahan struktur sosial masyarakat dipengaruhi oleh alih fungsi lahan pertanian. Tokuasa (2010) dalam penelitiannya, “Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Struktur Sosial Masyarakat di Kampung

Sorowajan,” menunjukkan bahwa pergeseran penggunaan lahan dari pertanian menjadi area komersil memengaruhi pola interaksi sosial dan status hierarki. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada lahan pertanian kini menghadapi tantangan seperti peningkatan harga tanah dan penurunan akses terhadap sumber penghidupan tradisional. Selain itu, kedatangan pendatang baru dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda memicu perubahan dalam struktur komunitas, menciptakan ketegangan antara penduduk asli dan pendatang. Penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan alih fungsi lahan yang berkelanjutan dan memperhatikan dampak sosial, agar masyarakat dapat beradaptasi tanpa kehilangan identitas dan kesejahteraan mereka.

Pemerintah memiliki andil dalam merancang dan mengambil berbagai keputusan yang berkaitan dengan kebijakan alih fungsi lahan. Peran pemerintah pun kerap ditinjau lebih dalam di dalam implementasi suatu kebijakan. Sebab, pemerintah menjadi aktor utama di dalam lingkaran tata kelola pemerintahan, bersamaan dengan pihak swasta atau perusahaan dan masyarakat. Jika meninjau karya Ardani (2020) mengenai “Alih Fungsi Lahan Pertanian Ditinjau dari Penyelenggaraan Pangan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan,” peran pemerintah menjadi hal yang penting untuk dapat dianalisis lebih dalam. Lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi kawasan industri kerap dikaji lebih ulang, menilai dari dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah

memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan alih fungsi penggunaan lahan yang berpotensi menimbulkan kegagalan produksi pangan.

Pada kasus serupa, Fauzan, Syaodih, dan Saraswati (2022) menganalisa peran pemerintah dalam menghadapi alih fungsi lahan di Kelurahan Ciumbuleuit. Penelitian tersebut mengambil tempat di kawasan yang merupakan tanah Ex- erpacht peninggalan zaman kolonial dan sebagian besar menjadi wilayah konservasi. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis MACTOR yang melihat keterkaitan tujuan antar-aktor dalam menghadapi dampak alih fungsi lahan. Alhasil, diperoleh bukti bahwa 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki pengaruh tertinggi dalam menangani dampak kerusakan akibat alih fungsi lahan di Kelurahan Ciumbuleuit. Aktor pemerintah pun terbukti memegang peran penting dalam menciptakan aspek monitoring dan pemutus keputusan dalam berbagai hal terkait alih fungsi lahan.

Berdasarkan aspek literatur, sebagian besar penelitian terdahulu menekankan beberapa perbedaan signifikan terkait dampak negatif alih fungsi lahan terhadap kehidupan masyarakat agraris, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Penelitian oleh Prayoga et al. (2019), Irma (2015), Iskandar D.Y. (2014), Aziz (2018), Mahardika dan Muta'ali (2018), serta Tokuasa (2010) menunjukkan bahwa alih fungsi lahan menyebabkan marginalisasi petani, penurunan pendapatan, degradasi lingkungan, hingga ketegangan sosial antara penduduk asli dan pendatang. Fokus penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menggambarkan kerugian yang dialami

masyarakat, serta perubahan pola interaksi sosial yang cenderung negatif. Hal ini berbeda dengan temuan Mulyadi (2015) dan Utomo (2018) yang justru mengungkapkan adanya sisi positif dari alih fungsi lahan, yakni terbukanya peluang ekonomi baru dan tumbuhnya solidaritas sosial, meskipun tetap diiringi oleh risiko sosial-budaya.

Di sisi lain, beberapa penelitian juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengelola alih fungsi lahan. Ardani (2020) serta Fauzan, Syaodih, dan Saraswati (2022) menunjukkan bahwa pemerintah merupakan aktor utama dalam menentukan arah tata kelola lahan, baik melalui regulasi pangan maupun koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Penelitian mereka menegaskan bahwa lemahnya pengawasan, minimnya monitoring, dan orientasi kebijakan yang lebih pro-investasi sering kali memperburuk kondisi masyarakat terdampak. Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus kajian yang tidak hanya menyoroti dampak negatif dan positif dari alih fungsi lahan, tetapi juga secara spesifik menganalisis bagaimana peran pemerintah di kawasan industri MM2100 tidak berjalan sesuai teori tata kelola, sehingga justru memperdalam ketimpangan sosial-ekonomi di tingkat lokal.

Lebih lanjut, penelitian-penelitian yang memiliki fokus di dalam transformasi lahan pertanian menjadi kawasan industri menggarisbawahi dampak nyata dan langkah yang belum tercapai dari pihak swasta maupun pemerintah. Ini mengapa, peneliti memilih untuk menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan fokus dari penelitian yang akan dilakukan.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan merupakan sebuah perubahan penggunaan ataupun fungsi lahan secara keseluruhan ataupun sebagian dari tujuan awalnya untuk tujuan lain (Utomo, A. W., 2018), yang sering menyebabkan dampak negatif baik dalam bidang sosial maupun ekologi lokal setempat. Proses ini tidak saja menyangkut perubahan fisik penggunaan lahan, tetapi juga mencerminkan perubahan dalam struktur sosial masyarakat yang semakin melepaskan diri dari pola hidup agraris dan beralih ke pola kehidupan industri yang lebih bergantung pada sector non-pertanian.

Pertumbuhan kebutuhan lahan untuk pemukiman dan fasilitas industri menjadi salah satu faktor pendorong utama alih fungsi lahan ini. Sejalan dengan adanya pertumbuhan penduduk dan terus meningkatnya kebutuhan ruang untuk berbagai kegiatan ekonomi, banyak daerah pertanian beralih status menjadi daerah non-pertanian, seperti industri dan pemukiman. Menurut Sumaryanto (1994) yang dikutip dalam Hidayat (2008: 48), perubahan fungsi ini memiliki kemampuan menimbulkan dampak negatif baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Salah satu dampak yang paling nyata ialah kehilangan kapasitas lahan untuk menghasilkan sektor pertanian, yaitu sumber mata pencaharian utama masyarakat petani. Selain itu, peralihan lahan ini juga menyebabkan hilangnya peluang kerja di sektor pertanian, yang sebelumnya merupakan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk lokal.

Keberadaan lahan pertanian, seperti yang ditegaskan oleh Hidayat (2008), bukan hanya memiliki nilai ekonomi sebagai sumber produksi pangan, tetapi juga nilai sosial yang tak kalah penting. Lahan pertanian sering kali terkait erat dengan struktur kelembagaan masyarakat petani mencakup sistem kerja, budaya, dan pola hubungan sosial dalam masyarakat agraris. Konversi lahan pertanian menjadi lokasi komersial atau industri telah secara signifikan mengubah tatanan sosial masyarakat desa yang bergantung pada pertanian sebagai cara hidup, yang menyebabkan fragmentasi sosial dan hilangnya kohesi dalam komunitas petani. Oleh karena itu, perubahan fungsi lahan memberi dampak tidak hanya kepada sektor ekonomi, melainkan merombak struktur sosial penduduk yang tergantung pada sektor pertanian.

1.6.2. Peran Pemerintah dalam Alih Fungsi Lahan dan Dampaknya

Peran pemerintah dalam transformasi lahan menjadi hal yang sangat krusial, terutama di tengah dinamika perkembangan pembangunan yang kerap menimbulkan konflik agraria. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur kebijakan, tetapi juga sebagai mediator yang mengelola berbagai ketegangan yang muncul akibat perubahan fungsi lahan dan dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, teori peran pemerintah memberikan kerangka untuk memahami bagaimana negara atau pemerintah daerah berinteraksi dengan berbagai aktor sosial, ekonomi, dan politik dalam menghadapi permasalahan transformasi lahan. Konflik yang

sering timbul, baik yang berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, atau perubahan struktur sosial yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan, memerlukan intervensi yang bijak dari pemerintah. Oleh karena itu, kajian terhadap peran pemerintah dalam konteks ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana kebijakan dan tindakan pemerintah dapat meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan yang adil dan merata.

Peran pemerintah dalam konteks konflik agraria dapat dilihat dari perspektif teori konflik, yang mengedepankan peran negara atau pemerintah sebagai aktor yang memediasi atau mengelola ketegangan yang timbul akibat perubahan sosial atau distribusi sumber daya. Salah satu teori yang relevan adalah teori peran pemerintah dalam menghadapi konflik agraria yang diajukan oleh Aziz (2019). Dalam penelitian tersebut, Aziz menggunakan teori konflik untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam menangani perubahan struktur sosial yang sering terjadi dalam konteks agraria. Aziz mengidentifikasi tiga peran utama yang dimainkan oleh pemerintah daerah, yaitu pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Ini mencerminkan pentingnya peran pemerintah dalam memitigasi dampak sosial yang timbul akibat konflik agraria yang disebabkan oleh perubahan fungsi lahan atau kebijakan pembangunan.

Lebih lanjut lagi, penelitian Ardani (2020) menggarisbawahi bahwa peran pemerintah sangat krusial dalam mengatur alih fungsi lahan pertanian menjadi

kawasan industri, untuk mencegah dampak negatif terhadap ketahanan pangan. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah berperan tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai mediator yang mengelola perubahan sosial dan ekonomi. Penelitian Fauzan, Syaodih, dan Saraswati (2022) pun memperlihatkan bagaimana pemerintah daerah, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memainkan peran penting dalam menangani kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan, dengan menunjukkan pentingnya keputusan kebijakan dan pengawasan pemerintah. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan yang mengatur dan memutuskan kebijakan terkait agraria dan alih fungsi lahan sangat penting untuk mengatasi konflik sosial dan ekonomi yang muncul.

1.6.3. Dampak Negatif Transformasi Lahan Pertanian

Transformasi lahan pertanian menjadi lahan industri merupakan fenomena yang semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan ekonomi dan urbanisasi. Latuamury et al. (2021) mengungkapkan bahwa, konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri menyebabkan berkurangnya daerah resapan air secara signifikan, yang mengakibatkan peningkatan limpasan permukaan dan memperparah risiko banjir di musim hujan serta krisis air di musim kemarau karena menurunnya cadangan air tanah. Lebih dari itu, transformasi lahan pertanian menjadi kasus yang tidak membawa dampak positif, baik bagi masyarakat maupun lingkungan. Sebab, terdapat beberapa

dampak turunan yang muncul akibat transformasi lahan, pada konteks ini lahan pertanian menjadi lahan industri.

Dampak lain yang signifikan dari transformasi lahan adalah berkurangnya keanekaragaman hayati (Rahmawati (2022)). Pada konteks ini, konversi hutan dan lahan basah menjadi area pertanian atau pemukiman telah menyebabkan hilangnya habitat alami bagi berbagai spesies flora dan fauna, sehingga mengancam keberlangsungan ekosistem dan mempercepat laju kepunahan spesies tertentu.

Berdasarkan aspek sosial-ekonomi, transformasi lahan juga berimplikasi pada perubahan struktur mata pencaharian masyarakat. Menurut Widodo et al. (2023), alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau perumahan seringkali memarginalkan petani kecil yang kehilangan sumber penghasilan utamanya dan terpaksa beralih ke sektor informal dengan pendapatan yang tidak stabil, sehingga berpotensi meningkatkan kesenjangan sosial di masyarakat.

Selain itu, transformasi lahan memiliki kontribusi terhadap perubahan iklim mikro dan global. Sebab, konversi lahan vegetasi menjadi area terbangun dapat menyebabkan peningkatan suhu permukaan lokal (*urban heat island*) dan mempengaruhi pola curah hujan (Gunawan dan Prasetyo 2024). Di sisi lain, deforestasi akibat alih fungsi lahan hutan mengurangi kemampuan penyerapan

karbon, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan gas rumah kaca di atmosfer yang berdampak pada perubahan iklim secara global.

1.7. Operasionalisasi Konsep

1. Peran Pemerintah

Peran pemerintah menitikberatkan kepada tata kelola serta integritas pemerintah sebagai instansi negara dalam menangani dampak negatif yang berpotensi terjadi di tengah aktivitas transformasi lahan dan pembangunan lahan industri. Dalam hal ini, pemerintah berfungsi sebagai perumus kebijakan sekaligus mediator yang mengelola berbagai aspek serta hubungan perizinan penggunaan lahan.

2. Dampak Negatif Transformasi Lahan Pertanian

Dampak negatif transformasi lahan pertanian terhadap kawasan industri menggarisbawahi berbagai aspek penting untuk lebih lanjut menganalisa berbagai dampak turunan. Pada hal ini, penelitian ini memiliki sejumlah indikator yang dapat dianalisis seperti dampak sosial-ekonomi dan dampak ekologis. Dua indikator tersebut dapat mewakili secara keseluruhan dampak negatif yang berpotensi muncul akibat transformasi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Sebab, indikator tersebut menjadi komponen penting untuk menganalisa secara mendalam tentang berbagai hal yang terjadi sebelum dan sesudah ada aktivitas transformasi lahan.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Moleong (2013) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami suatu fenomena melalui perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata baik tertulis maupun lisan, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah menggambarkan secara realita atau apa adanya di balik fenomena secara mendalam dan detail sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Dalam hal ini peneliti harus dekat dengan realitas yang akan diteliti. Data yang dikumpulkan sebanyak mungkin oleh peneliti berasal dari berbagai sumber dan dapat menghasilkan data terkait topik yang akan diteliti yang berasal dari lapangan.

Di dalam penelitian kualitatif, kehadiran nilai peneliti bersifat eksplisit dalam situasi yang terbatas, melibatkan subjek dengan jumlah relatif sedikit. Peneliti kualitatif biasanya terlibat dalam interaksi dengan realitas yang ditelitinya. Tujuan lain dari penelitian kualitatif sebagaimana disampaikan Gunawan (2013), yaitu mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.

1.8.2. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan seorang atau sekelompok orang yang betul-betul mengetahui perihal persoalan yang akan dianalisis pada penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk mengambil data penelitian melalui berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut bahwa informan terkait telah memenuhi kualifikasi karena menguasai situasi sosial yang akan diteliti. Pada penelitian ini informan yang memahami dan mengerti mengenai kondisi struktur sosial masyarakat setelah transformasi lahan dalam pembangunan Kawasan Industri di MM 2100 Kabupaten Bekasi, yang dipilih sebagai berikut:

No	Nama	Informan	Status	Data yang dicari
1	Saidina Ali	Masyarakat Desa Ganda Mekar	Petani Terdampak	Dampak negatif alih fungsi lahan
2	Tresna	Perwakilan Organisasi Tani di Cikarang Barat	LSM	Tingkat kesejahteraan dan keterlibatan petani
3	Zulhan	Masyarakat Desa Mekarwangi	Petani Terdampak	Dampak negatif alih fungsi lahan
4	Tutik	Kader PKK Desa Ganda Mekar	Anggota Kader PKK	Dampak negatif alih fungsi lahan
5	Johan Bangun P. Siregar, S.ST	Dinas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bekasi	Dinas Pemerintah	Peran Pemerintah
6	Lulu Rosidah S.T., M.Si	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan	Dinas Pemerintah	Peran Pemerintah

		Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi		
--	--	--	--	--

1.8.3. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Sumber data primer diperoleh peneliti melalui wawancara dan observasi atau pengamatan langsung. Penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka serta dilengkapi dengan pengamatan. Wawancara yang diterapkan dalam penelitian kualitatif adalah menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) (Gainau, 2016).

Hubungan antara peneliti dengan informan dibuat sedekat atau senyaman mungkin supaya subyek penelitian bersikap terbuka dalam memberi informasi atau data berkaitan dengan jawaban terhadap permasalahan penelitian agar peneliti lebih mengetahui secara mendalam dan mendetail mengenai perubahan-perubahan dan dampak yang terjadi akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri. Di dalam penelitian ini, khususnya pada metode wawancara, peneliti akan melibatkan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan masyarakat petani dan masyarakat umum di wilayah atau Kawasan Industri MM 2100 Bekasi.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data berupa wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai permasalahan yang diangkat di dalam penelitian. Wawancara ~~akan~~ dilakukan kepada beberapa informan penelitian yang terdiri dari masyarakat setempat, Ketua Paguyuban Petani di Kabupaten Bekasi, dan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Proses wawancara mengacu kepada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dalam wawancara tersebut peneliti dapat mengembangkan pertanyaan kepada yang bersangkutan untuk memperkuat data penelitian. Adapun hasil dari proses wawancara tersebut akan disusun dalam transkrip wawancara.

2. Observasi

Di dalam penelitian ini akan dilakukan serangkaian observasi atau pengamatan guna memperoleh informasi tambahan. Observasi akan dilakukan pada beberapa tempat yang menjadi lokasi penelitian. Dilakukannya observasi juga dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pernyataan yang diberikan oleh narasumber telah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen diperlukan di dalam penelitian dengan tujuan untuk memperdalam serta memperjelas data yang akan diambil dengan cara

menyesuaikan dengan sumber-sumber keilmuan yang sesuai dengan topik permasalahan dalam penelitian. Diadakannya studi dokumen dapat memberikan gambaran umum tentang pengetahuan saat ini, serta memungkinkan bagi peneliti untuk mengidentifikasi teori, metode, dan berbagai informasi yang relevan dengan topik penelitian yang diambil.

1.8.5. Teknik Analisa Data

1. Pengumpulan Data

Data yang digunakan di dalam penelitian diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi selama jangka waktu tertentu. Pada tahap awal, peneliti akan melakukan penjelajahan secara umum mengenai topik yang dibahas, dimulai dengan mendatangi beberapa lokasi penelitian yang dapat digunakan sebagai lokasi untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan yang dibahas di dalam penelitian.

2. Reduksi Data

Tahapan yang selanjutnya dilakukan setelah pengumpulan data yakni mereduksi data, merangkum dan memilih data penting yang kemudian dikelompokkan agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah proses penelitian selanjutnya.

3. Penyajian Data

Di dalam tahapan penyajian data, peneliti akan melakukan display data yang dapat ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik atau sejenisnya. Melalui penyajian data yang dilakukan, data yang telah dikumpulkan diharapkan dapat terorganisir, tersusun, mudah dipahami dan mempermudah langkah kinerja selanjutnya.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir yakni penarikan kesimpulan, dimana di dalam tahapan ini peneliti membuat kesimpulan sementara yang mungkin berubah dengan asumsi bukti baru, kuat dan mendukung fase pengumpulan informasi berikutnya, dapat berupa jawaban atas definisi masalah atau mungkin tidak.

1.8.6. Triangulasi Data

Setelah melakukan analisa data, tahapan berikutnya melakukan pengujian data meliputi *validitas internal*, *validitas eksternal*, *reliabilitas* dan objektivitas. Peneliti mengarahkan tes untuk menunjukkan bahwa informasi yang didapat sama dengan informasi yang ditemukan sebelumnya. Dalam melakukan uji keabsahan data dari penelitian ini, penulis akan menggunakan Teknik uji kredibilitas Triangulis. Triangulis dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan berbagai waktu. Dalam mengecek keabsahan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulis sumber

dan triangulis teknik. Triangulis sumber dilakukan untuk menguji informasi dengan memeriksa informasi yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulis teknik dilakukan untuk menguji keabsahan informasi dengan benar-benar melihat informasi pada sumber yang sejenis dengan berbagai teknik.